DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

B.

2006.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 1 Tahun 2015. Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2015.
<i>Undang-Undang tentang Pemilihan Umum</i> . UU Nomor 7 Tahun 2017. Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017
Buku
Amalia, Luki Sandra, dkk. <i>Evealuasi Pemilu Legislatif 2014: Analisi Proses dan Hasil</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Asshiddiqie, Jimly. <i>Konstitusi dan Konstitualisme</i> . Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Krisna, I Made. Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose, 2015.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Lubis, Maulana Arafat. *Pembelajara PPKn*. Medan: Akasha Sakti 2018.
- M.D., Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mangunsong, Nurainun. *Hukum Tata Negara I.* Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2010).
- Pakpahan, Muchtar. *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Bumi Intitarma Sejahtera, 2006.
- Prayitno, H. A. *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2001.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Saleh. Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Suharti, Eni. *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Tahun 2011*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Suryadi, Budi. Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep. Yogyakarta: IRCiSoD, 2007.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais*. Bandung: Mizan Publika, 2005.
- Ubaidillah, A. dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarf Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Wijayanti, Septi Nur dan Nanik Prasetyoningsih. *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2009.
- Wiyanto, Roni. *Penegakan Hukum Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Zoelva, Hamdan. Jurnal Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013.

C. Lain-lain

- Ahdayanto, Eko. "Cawalkot Dari Paslon 2 Berisiko Kena Sanksi Pidana", https://akuratnews.com/cawalkot-dari-paslon-2-berisiko-kena-sanksipidana/. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Akbar, Putra M. "In Picture: APK Pilkada Depok Dipasang di Tempat Pemakaman Umum". https://republika.co.id/amp/qinla3314. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Amelia, Vini Rizki. "Deklarasi Koalisi Bangkit Usung Pradi-Afifah di Pilkada Depok Tak Perhatikan Protokol Kesehatan", https://wartakota.tribunnews.com/2020/09/03/deklarasi-koalisi-bangkit-usung-pradi-afifah-di-pilkada-depok-tak-perhatikan-protokol-kesehatan?. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Ariefana, Pebriansyah. "GEGER Spanduk Muhammadiyah Tak Rela Depok Dipimpin PKI Perjuangan". https://jakarta.suara.com/amp/read/2020/09/06/163514/geger-spanduk-muhammadiyah-tak-rela-depok-dipimpin-pki-perjuangan. Diakses tanggal 15 Januari 2021.

- Arjanto, Dwi. "Penyebab Satu Satpol PP Depok Tersengat Listrik Saat Turunkan APS Pilkada 2020". https://metro.tempo.co/read/1390296/penyebab-satu-satpol-pp-depok-tersengat-listrik-saat-turunkan-aps-pilkada-2020/full&view=ok. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Barlini, Luli. Ketua Bawaslu Kota Depok. *Hasil wawancara* tanggal 12 Januari 2021.
- Genesis, George. "Golkar Pecat Kader yang Dukung Idris-Imam di Pilkada Depok". https://m.liputan6.com/pilkada/read/4381233/golkar-pecat-kader-yang-dukung-idris-imam-di-pilkada-depok. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Gondrong, Wahyu. "Rusak Demokrasi, Camat dan Lurah di Bojongsari Terangterangan Kampanye Dukung Idris". https://www.depoktren.com/2019/12/15/rusak-demokrasi-camat-dan-lurah-di-bojongsari-terang-terangan-kampanye-dukung-idris/. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Hadiawan, Agus. "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung)". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.
- Hantoro, Juli. "Diajak Satu Kamar, Afifah Alia Merasa Dilecehkan Rivalnya di Pilkada Depok". https://metro.tempo.co/read/1384785/diajak-satu-kamar-afifah-alia-merasa-dilecehkan-rivalnya-di-pilkada-depok. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Ilyasa, Bara. "Pilkada Depok, Beredar Baliho Hanya Paslon PKS". https://rri.co.id/nasional/pilkada-2020/934932/pilkada-depok-beredar-baliho-hanya-paslon-pks?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaig n=General%20Campaign. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Langgar". Tersedia di https://kbbi.web.id/langgar.htm. Diakses tanggal 27 September 2020.

 ______. "Pelaksanaan". Tersedia di https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html. Diakses tanggal 27 September 2020.

 ______. "Penanganan". Tersedia di https://kbbi.web.id/penanganan.html. Diakses tanggal 27 September 2020.

- _____. "Serentak". Tersedia di https://kbbi.web.id/serentak.html, Diakses tanggal 27 September 2020.
- Mantalaen, Vitorio. "Pilkada Depok: 23 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Paslon". https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/06/13484471/pilkada-depok-23-pelanggaran-protokol-kesehatan-selama-kampanye-paslon?page=all. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Redaksi Kompas. "Calon Wakil Walkot Depok Afifah Alia Merasa Dilecehkan, Imam Budi Merasa Tak Bersalah". https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/10/16002801/calon-wakil-walkot-depok-afifah-alia-merasa-dilecehkan-imam-budi-merasa?amp=1&page=2. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Redaksi. "Pengamat Pilkada dan Wujud Demokrasi di Tingkat Lokal". http://okberita.com. Diakses tanggal 5 Januari 2021.
- Redaksi. "Sejarah Pengawasan Pemilu". http://www.bawaslu.go.id. Diakses tanggal 5 Januari 2021.
- Tahmid, Khairuddin. "Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesain Sengketa Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Fakultas Syari "ah IAIN Raden Intan Lampung*, 2008.
- Triyoga, Hardani. "Tak Netral di Pilkada Depok, Oknum Kepala Sekolah Masuk Pengadilan", https://www.viva.co.id/pilkada/pilbup/1329797-tak-netral-di-pilkada-depok-oknum-kepala-sekolah-masuk-pengadilan. Diakses tanggal 15 Januari 2021.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". Tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia. Diakses tanggal 27 September 2020.
- Yusdianto. "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiiannya". *Jurnal Konstitusi*. Vol. II Nomor 2, November 2010.